

Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Perencanaan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Desi Yunsira

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Indonesia
E-Mail: desi.yunsira@gmail.com

85

Dewi Sartika

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Indonesia
E-Mail: dewisartika@utu.ac.id

Submitted:
21 OCTOBER 2023

Accepted:
12 JANUARY 2023

ABSTRACT

Increasing PAD (Pendapatan Asli Daerah) or local original income will have a good influence on increasing regional development and development. The better the contribution of PAD to the APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), the less the government's fiscal dependence will be. This research was conducted to find out how effective the role of Bappeda is in planning local revenue in Southwest Aceh Regency. The type of research used is qualitative research with descriptive analysis method, which is research that refers to the preparation of theories formed by collecting data, compiling data, and analysing data. The data used in this study were sourced from primary and secondary data, which were obtained through observation and interviews. The results of the study concluded that in general the role of the Regional Development Planning Agency of Southwest Aceh Regency in Planning for Regional Original Revenue (PAD) is included in the criteria very effective, this can be seen from the average value of the effectiveness level of regional original revenue revenue of Southwest Aceh Regency during 2019 to 2022 which is 107.51%.

Keywords: Effectiveness, Bappeda, Regional Finance, Locally-Generated Revenue

ABSTRAK

Peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah akan memiliki pengaruh yang baik dalam peningkatan perkembangan dan pembangunan daerah. Kontribusi PAD terhadap APBD semakin baik, maka ketergantungan fiskal pemerintah juga akan semakin sedikit. Tujuan penelitian ini ialah peneliti ingin melihat dan mengetahui seberapa efektif Bappeda dalam menjalankan peran perencanaan pendapatan asli daerah di Abdaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mengacu pada penyusunan teori yang dibentuk dengan pengumpulan data, penyusunan data, serta menganalisis data. Observasi dan wawancara adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah termasuk ke dalam kriteria sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PAD Kab. Abdaya sejak tahun 2019 hingga 2022 yaitu sebesar 107,51%.

Kata kunci: Efektivitas, Bappeda, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah akan memiliki pengaruh yang baik dalam peningkatan perkembangan dan pembangunan daerah. Apabila kontribusi PAD

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 12 No. 1, 2024
pp. 85-92
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v12i1.2429

(Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) semakin baik, maka ketergantungan fiskal pemerintah juga akan semakin sedikit. Ini menunjukkan bahwa suatu daerah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan memiliki kemampuan untuk beroperasi sendiri (Fitriyolla, 2022). Sumber daya keuangan yang berasal dari luar PAD berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan pembangunan daerah (Machmud & Radjak, 2018). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah, dan pendapatan asli daerah, sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah daerah diberikan hak sepenuhnya untuk memaksimalkan potensi pendapatan PAD daerahnya sendiri (Bustani et al., 2022). Hal ini sesuai dengan definisi otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah otonom di Indonesia memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa pihak yang berperan penting dalam hal perencanaan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Yasin, 2020). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu perangkat daerah di kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tanggung jawab dan peran penting untuk memastikan keberhasilan perencanaan PAD. Oleh sebab itu, bappeda harus dapat memaksimalkan perannya agar pendapatan asli daerah bisa meningkat setiap tahunnya (Mahdalena et al., 2022). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya seperti masih sangat rendahnya hasil pendapatan asli daerah yang dikumpulkan sehingga menyebabkan ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan daerah tidak mampu untuk membiayai belanja daerahnya sendiri.

Data pajak yang tidak diperbarui menjadi salah satu faktor yang menghambat proses perencanaan pendapatan asli daerah, semakin banyaknya hotel, rumah makan, serta tempat hiburan lainnya yang dibangun di kabupaten Aceh Barat Daya yang diwajibkan untuk membayar pajak, namun tidak ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak daerahnya. Kamil (2015) and Herawati et al. (2018), hal lainnya seperti pemahaman masyarakat (wajib pajak) tentang ketentuan dan prosedur pembayaran pajak juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, masih banyak masyarakat yang belum paham akan betapa pentingnya pembayaran pajak sehingga masih ada beberapa wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pendapatan dan operasi usahanya, sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah seharusnya yang telah ditentukan. Jumlah PAD atau pendapatan asli daerah selama empat tahun terakhir dikabupaten Abdy dapat dilihat pada tabel 1.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Aceh Barat Daya

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Abdya selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dan belum bisa dikatakan stabil. Jumlah pendapatan asli daerah tertinggi diterima pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp98.445.461.071, sedangkan jumlah terkecil diterima pada tahun 2021 sebesar Rp87.381.951.971. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Aceh Barat Daya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran badan perencanaan pembangunan daerah efektif dalam merencanakan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman baik secara teoritis maupun praktis terkait peran bappeda dalam perencanaan pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi badan perencanaan pembangunan daerah yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi, referensi, dan bahan pertimbangan bermanfaat bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi berhasil atau gagal dalam mewujudkan tujuan-tujuannya (Melinda & Rachmawati, 2019; Agustin & Sudiarti, 2022). Efektivitas pajak daerah mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghimpun pajak daerah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagai target (Lohonauman, 2016; Sartika et al., 2019). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 tentang pembentukan bappeda pada tingkat II (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu lembaga sektor publik yang berperan untuk memberikan dukungan demi menjaga keberlangsungan pembangunan di suatu daerah (Agustin & Sudiarti, 2022).

Mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah, karena dapat dikaji dari berbagai macam sudut pandang sesuai dengan peneliti masing-masing, dan penilaian dilakukan terhadap konsep efektivitas yang telah ada sebelumnya (Rizam, 2019; Hanifah & Nurlaila, 2023). Salah satu cara lain untuk mengetahui tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan rencana yang telah dibuat dengan hasil yang telah dicapai di dunia nyata (Yasin, 2020; Arina et al., 2021). Ketika hasil yang dicapai tidak sejalan dengan rencana yang telah disusun, maka dapat dikatakan tidak efektif. Pengukuran efektivitas memerlukan beberapa indikator tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam menilai tingkat efektivitas. Indikator efektivitas menunjukkan pengaruh (hasil) dari hasil program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses kerja yang dilakukan oleh suatu unit organisasi akan lebih efektif jika kontribusi hasil yang dihasilkan lebih besar untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Mufliha dan Selvi 2021; Julianto & Carnarez, 2021).

Diperlukan suatu kriteria atau ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitas. Azkiya & Novianti (2020) menjelaskan bahwa kriteria efektivitas. Seberapa banyak output yang bisa dihasilkan, output yang dimaksud mencakup jumlah atau bentuk nyata dari suatu organisasi. Ini dapat diperhatikan melalui perbandingan (rasio) antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), usaha yang menghasilkan persentase hasil, pencapaian program kerja, dan sejenisnya. Persentase kepuasan yang dapat diperoleh, Efektivitas sendiri dapat diukur dengan seberapa banyak jumlah yang dihasilkan dan seberapa bermutu atau berkualitasnya output yang dihasilkan. Produk kreatif, pembentukan lingkungan kerja yang kondusif, yang dapat merangsang kreativitas dan kemampuan. Intensitas yang akan dicapai, menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap tingkat intensitas tertentu dan perasaan saling memiliki yang tinggi. Untuk menilai seberapa efektif bappeda dalam perencanaan pendapatan asli daerah, peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Azkiya & Novianty (2020).

Tabel 2. Pengukuran Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat-Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup-Efektif
60-80%	Kurang-Efektif
<60%	Tidak-Efektif

Source: Depdagri, Kemendagri (Adelina, 2013).

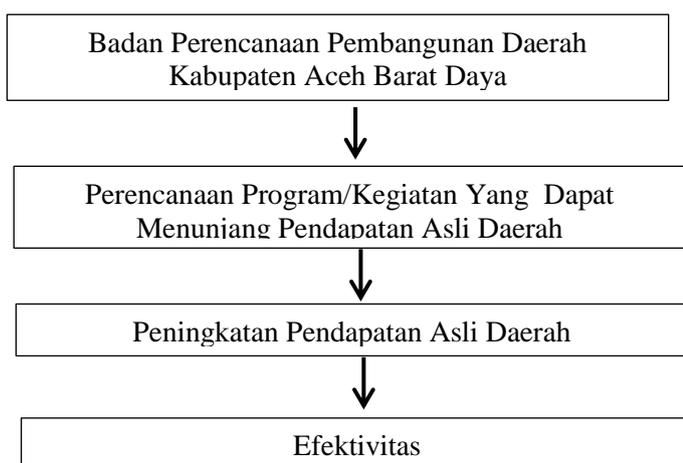
Fahrinda (2022) PAD atau pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah tersebut sendiri. Pendapatan asli daerah ini menjadi suatu kebanggaan suatu daerah karena daerah tersebut bisa mandiri. Pendapatan asli daerah ini dipergunakan untuk pembangunan pembangunan didaerah tersebut. Adapun sumber dari pendapatan asli daerah ini dapat bermacam macam, seperti daeri pajak daerah, retribusi daerah, hasil daeri pengelolaan kekayaan yang ada di wilayah tersebut dan pendapatan pendapatan lain yang sudah diatur didalam undang undang dasar (Anggoro 2017; Digdowniseiso & Rengganisa 2023).

Pajak daerah merupakan bentuk pungutan yang yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap penduduk, perusahaan, atau entitas ekonomi di wilayah administratifnya (Dixit & Sharif, 2019). Pajak ini bertujuan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan di tingkat lokal, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan keperluan masyarakat setempat. Contoh pajak daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Hiburan. PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, sedangkan PKB diterapkan pada pemilik kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah tersebut. Pajak Hiburan dapat dikenakan pada kegiatan hiburan seperti pertunjukan, bioskop, atau tempat rekreasi lainnya di tingkat lokal. Pendapatan dari pajak-pajak ini digunakan untuk mendukung pengembangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Retribusi daerah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masyarakat daerah atas pelayanan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah yang digunakan secara bersama sama oleh masyarakat daerah tersebut. Contoh retribusi melibatkan pembayaran oleh pengguna jasa untuk layanan tertentu, seperti retribusi parkir, retribusi sampah, atau retribusi pariwisata. Pendapatan dari pungutan ini diarahkan untuk mendukung pemeliharaan, pengembangan, dan penyediaan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau kelompok tertentu di tingkat lokal. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, juga dikenal sebagai HPKDD, adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari mengelola sumber daya ekonomi seperti tambang, kehutanan, dan perairan. Contohnya adalah royalti atau bagi hasil yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. HPKDD menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, yang diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan daerah. Dengan memanfaatkan kekayaan daerah secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat (Fitriyani et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk dalam kategori Lain-lain PAD yang sah merujuk pada sumber pendapatan daerah selain dari sektor pajak dan retribusi. Ini mencakup berbagai penerimaan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari kegiatan atau layanan tertentu. Contohnya melibatkan penjualan aset daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari investasi dan penanaman modal, serta dana-dana lain yang diperoleh secara sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya, selain dari pajak dan retribusi, guna mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber pendapatan ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat Daya. Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah (Agustin & Sudiarti, 2022). Salah satu perencanaan yang dilakukan Bappeda adalah merumuskan program/kegiatan yang diharapkan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan akhir dari perencanaan program/kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah PAD yang diperoleh Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya. Efektivitas menjadi konsep kunci dalam penelitian ini, yakni sejauh mana efektivitas peran Bappeda Kab. Abdy dalam merencanakan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan realisasi PAD. Apakah target kenaikan PAD yang ditetapkan oleh Bappeda berhasil dicapai atau tidak. Berdasarkan landasan teori di atas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Pengukuran Efektivitas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif dan berfokus pada pembentukan teori melalui pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data sebagai langkah terakhir. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan kedalaman pemahaman. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan kepala bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi laporan realisasi anggaran selama empat tahun (2019, 2020, 2021, dan 2022). Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan langkah pengumpulan data yang dianggap relevan, penyajian data, kemudian selanjutnya reduksi data yang sudah terkumpul sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan hasil observasi yang sudah diperoleh.

HASIL

Menurut data yang penulis peroleh dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Aceh Barat Daya, sumber PAD tertinggi diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pendapatan asli daerah, penulis membandingkan realisasi dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.

Table 2. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi	Efektivitas (%)
2019	Rp88.541.383.069	Rp90.348.940.272	102,04%
2020	Rp98.445.461.071	Rp111.763.379.942	113,53%
2021	Rp87.381.951.971	Rp91.756.420.320	105,01%
2022	Rp90.122.584.528	Rp98.646.278.908	109,46%

Source: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Aceh Barat Daya

Seperti yang disajikan pada Tabel 2, tingkat efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 107,51%, yang artinya selalu melebihi target dan termasuk kedalam kriteria sangat efektif.

Table 3. Efektivitas Peran Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya

Indikator	Keterangan	Hasil
Meningkatkan kualitas dokumen pembangunan dan perencanaan melalui peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan pembangunan.	Penyusunan dokumen perencanaan.	Bappeda sudah melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan dengan baik serta sesuai prosedur.
	Pentahapan proses perencanaan dan penganggaran.	Pegawai harus dilatih dan disosialisasikan agar mereka lebih memahami dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan.
	Pada setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan, lakukan tugas pengendalian, koordinasi, dan sinkronisasi.	Sudah berjalan namun belum optimal, dikarenakan keterbatasan personil pegawai Bappeda.
Kualitas pengukuran indikator kinerja	Ketepatan indikator kinerja.	Sudah tepat namun belum optimal, sehingga para pegawai perlu untuk meningkatkan kompetensinya.
	Pemuktahiran data yang cepat, tepat dan akurat.	Pemuktahiran data dilakukan dengan tepat dan akurat, namun terkendala dengan waktunya.
	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilakukan di tingkat internal.
	Pelaporan capaian kinerja	Setiap pegawai Bappeda melakukan penginputan capaian kinerja setiap hari selama hari kerja di aplikasi E-Kinerja, serta diwajibkan bagi para pegawai untuk membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara pada Table 3, Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya perlu untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan perannya, agar pendapatan asli daerah bisa bertambah dan dapat dikatakan stabil. Bappeda harus terus melakukan evaluasi serta menciptakan dan menerapkan strategi-strategi terbaru untuk memaksimalkan perannya. Dengan meningkatkan koordinasi antar sektor pembangunan, dokumen perencanaan dan pembangunan menjadi lebih baik. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi proses penyusunan dokumen perencanaan serta mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan fungsi pengendalian di setiap tahap proses perencanaan dan penganggaran. Meningkatkan akurasi indikator kinerja, yang bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan ketepatan indikator kinerja, kualitas pelaporan capaian kinerja dan efektivitas monitoring dan evaluasi. Serta mengupayakan untuk melakukan pemuktahiran data dengan cepat, tepat dan akurat.

Bappeda Aceh Barat Daya memiliki peran penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa hal yang dilakukan Bappeda antara lain melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi sumber-sumber PAD, menyusun proyeksi target PAD bersama dinas terkait yang realistis sesuai kondisi daerah, merumuskan strategi optimalisasi penerimaan PAD dengan efektif dan efisien, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap capaian target PAD guna umpan balik perbaikan rencana di masa mendatang. Selain itu, Bappeda juga

berperan memberi masukan kepada pemda terkait regulasi atau kebijakan yang dapat mendukung peningkatan dan efektivitas PAD Aceh Barat Daya. Melalui implementasi peran-peran tersebut secara konsisten dan sinergis dengan dinas/badan terkait, diharapkan perencanaan PAD Aceh Barat Daya dapat dilakukan lebih efektif sesuai potensi riil yang dimiliki daerah. Bappeda Aceh Barat Daya melakukan pendataan dan pemetaan objek & subjek pajak guna mengidentifikasi potensi riil penerimaan pajak daerah. Bappeda juga menyusun basis data pajak daerah yang akurat dan terintegrasi. Selain itu, Bappeda berperan untuk memberikan masukan dalam penetapan target penerimaan pajak yang realistis serta merumuskan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak daerah.

Dalam hal retribusi daerah, Bappeda Aceh Barat Daya melakukan identifikasi jenis-jenis retribusi potensial di daerah. Bappeda juga berperan memberikan rekomendasi dalam penetapan tarif retribusi yang ideal serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pemungutan retribusi. Sementara itu, untuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bappeda dapat melakukan evaluasi kinerja dan kontribusi BUMD terhadap PAD. Bappeda juga dapat memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan target pendapatan BUMD. Selain itu, Bappeda berperan merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan peran BUMD. Terkait sumber PAD lainnya yang sah, Bappeda dapat mengidentifikasi sumber-sumber PAD lainnya yang potensial. Bappeda juga dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendapatan dari aset daerah serta melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait optimalisasi lain-lain PAD yang sah.

Bappeda Aceh Barat Daya dinilai telah menunjukkan kinerja yang sangat efektif dalam merencanakan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari berbagai program strategis yang dijalankan Bappeda dalam pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, evaluasi kinerja BUMD, hingga identifikasi sumber-sumber PAD lainnya yang sah. Program-program tersebut telah berhasil meningkatkan basis data perencanaan PAD yang akurat, penetapan target PAD yang realistis, hingga rumusan kebijakan intensifikasi dan perluasan objek dan subjek pendapatan yang potensial. Tak hanya itu, koordinasi dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam optimalisasi PAD juga berjalan sangat baik. Dengan demikian, keseluruhan program dan kegiatan yang dijalankan Bappeda Aceh Barat Daya dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan efektif dalam pencapaian target dan peningkatan kualitas perencanaan PAD daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mentari & Irham (2022) yang menunjukkan peningkatan pendapatan asli kota Medan tetapi belum stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilakukan peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut, Bappeda Aceh Barat Daya sudah melaksanakan perencanaan pendapatan asli daerah dengan sangat efektif. Dan Bappeda Aceh Barat Daya dalam menjalankan perannya untuk perencanaan pendapatan asli daerah belum bisa dikatakan stabil, sehingga Bappeda perlu untuk mengoptimalkan lagi perannya dalam hal peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pembangunan. Diharapkan kepada Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu SKPD yang berperan penting dalam hal perencanaan PAD, mampu untuk memberikan peran yang baik, efektif, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda itu sendiri. Peneliti selanjutnya agar memperluas cakupan penelitian tidak hanya terbatas pada satu kabupaten/kota, tetapi bisa diperluas ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk melihat perbandingan efektivitas peran BAPPEDA. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang berminat untuk melakukan penelitian serupa di daerah lain, sehingga dapat melakukan perbandingan dan memperkaya khasanah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- [2] Agustin, D. A., & Sudiarti, S. (2022). The Effectiveness of Bappeda's Role in Medan City Original Revenue Planning. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 539-544.
- [3] Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- [4] Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 26-35.
- [5] Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020, September). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar 11*. (1) 1009-1015.
- [6] Bustani, B., Khaddafi, M., & Ilham, R. N. (2022). Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income In Aceh Province Period Year 2016-2020. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(3), 459-468.
- [7] Digdowiseiso, K., & Rengganisa, A. (2023). Studi Literatur Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Mengangkat Perekonomian Ditengah Pandemi Covid19. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4694-4702.
- [8] Dixit, P., & Sharif, R. J. M. (2019). Standard Taxation Gaps & Reforms: A Critical Review of Revenue Policies of Kurdistan Region of Iraq. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 341-354.
- [9] Fahrinda, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 449-456.
- [10] Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(1).
- [11] FITRIYOLLA, E. R. (2022). Analisis Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Magelang Pada Masa Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.
- [12] Hanifah, L., & Nurlaila, N. (2023). Efektivitas Kinerja BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 65-74.
- [13] Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The effectiveness of the tax regulation socialization strategies on tax payers'comprehension and compliance in implementing their tax obligations. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 1(2), 131-140.
- [14] Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676-691.
- [15] Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience:(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104-111.
- [16] Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- [17] Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17-32.
- [18] Mahdalena, m., andry, a., & haliah, h. (2022). Local government budget orientation: a critique of budget policy. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 6(1), 1-9.
- [19] Melinda, E. A. L., & Rachmawati, I. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.... *Ekonomia. JMA: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 034-041.
- [20] Mentari, E. C., & Irham, M. (2023). Efektivitas Peran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 829-937.
- [21] Mufliha, Z. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bappeda Kabupaten Bogor) Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-13.
- [22] Rizam, T. (2019). *Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- [23] Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32-53.
- [24] Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465-472.